

Konflik Internal Somalia dalam Konteks Perang Sipil

oleh : Anna Yulia Hartati

Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : anna_uwh@yahoo.co.id

Abstraksi

Negara Somalia merupakan sebuah *failed state* yang tidak mampu melakukan fungsi keamanan dan pertahanan bagi negaranya. Kudeta dan pemberontakan militer tidak mampu diredam, justru menimbulkan konflik internasional yang merambah di ranah sipil. Konflik internal yang berujung pada kekerasan tidak menyurutkan pihak-pihak yang bertikai untuk segera menghentikan tindakannya. Kebanyakan korban yang jatuh adalah kalangan sipil yang bahkan tidak tahu apa tujuan dari perang yang sebenarnya "*if we win then for what, if we lose then by whom?*" di saat dunia internasional memulai perbaikan atas perang dan ancaman perang nuklir, negara-negara failed masih harus menghadapi ancaman dan bahkan mengancam warga negaranya sendiri.

Kata Kunci : Failed State, Perang Sipil, Konflik Internal

A. Pendahuluan

Tampaknya konflik internal masih mewarnai arena politik internasional. Konflik internal yang dibarengi dengan kekerasan ini merupakan salah satu dari hambatan-hambatan terbesar dalam upaya mencapai kemajuan manusia dan pembangunan. Konflik ini tidak saja menimbulkan banyak kematian dan luka-luka, tetapi juga kehidupan politik yang tidak stabil serta

menghambat lembaga-lembaga ekonomi dan pembangunan ekonomi dan sosial. Negara yang terlibat konflik sering menunjukkan ketinggalan, bukan kemajuan dari sisi indikator ekonomi dan sosial.

Setelah perang dingin berakhir dengan pecahnya Uni Soviet, banyak pihak berharap bahwa masa-masa perdamaian akan datang. Beberapa ahli di

dalam ilmu-ilmu sosial bahkan berpendapat, bahwa sejarah sudahlah berakhir dengan berakhirnya perang dingin. Sejarah berakhir dengan kemenangan demokrasi dan liberalisme. Para pemimpin dunia memimpikan sebuah tatanan dunia baru yang makmur dan damai. Tata dunia baru ini akan mencegah setiap bentuk peperangan, gesit di dalam menanggapi berbagai bencana alam, dan secara aktif melakukan pemerataan sumber daya demi kemakmuran seluruh bangsa.¹

Semua harapan tersebut tidak pernah menjadi kenyataan faktual. Beberapa tahun belakangan ini, dunia diwarnai dengan berbagai konflik etnis yang melibatkan beragam kepentingan politik dan ekonomi. Pada beberapa konflik, skala kekerasan yang terjadi begitu besar,

¹ Michael E. Brown, "Causes and Implications of Ethnic Conflict", dalam *The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism, and Migration*, Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain, Polity Press, 1997, hal. 80

dan bahkan dapat disebut sebagai genosida. Banyak orang tertegun dengan keluasan maupun kedalaman konflik yang terjadi. Perang di Bosnia-Herzegovina pada 1999 menarik banyak perhatian dan simpati dari seluruh dunia. Beberapa konflik lainnya, seperti di Afganistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Burma, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Bangladesh, Belgium, Bhutan, Burundi, Estonia, Ethiopia, Guatemala, Iraq, Latvia, Lebanon, Mali, Moldova, Niger, Irlandia Utara, Pakistan, Filipina, Rumania, Rwanda, Afrika Selatan, Spanyol, dan Turki, juga memiliki skala massal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Konflik politik di Tibet, Cina, dan Rusia juga tampak siap meletus menjadi konflik berdarah.²

² *ibid*, hal 88

Setelah berakhirnya perang dingin, konflik intra state sering menimbulkan banyak konflik di negara-negara yang belum mapan perekonomian maupun politiknya. Dimana konflik internal ini mengakibatkan stabilitas pertahanan keamanan nasional menjadi terancam dan mempengaruhi perdamaian dunia. Konflik internal yang berkepanjangan dapat dianggap oleh banyak pihak dapat mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan nasional yang berdampak pada perdamaian dunia.

Pada awalnya negara Afrika dijajah oleh tiga negara Eropa yakni Inggris, Perancis dan Italia kemudian ketiga penjajah ini membagi wilayah Afrika menjadi beberapa wilayah yang terpisah. Hal itu dapat dilihat berawal dari masa awal kemerdekaan dimana British Somaliland dan Italian Somalia digabung membentuk Republik Somalia. Mulai dari situlah muncul adanya pergerakan-pergerakan etnis yang menuntut hak klaim atas wilayah

kependudukan yang menjadi faktor pemicu awal terjadinya konflik di Somalia. Konflik Somalia berawal pada saat Presiden Siad Barre jatuh dari kepemimpinannya pada bulan Januari 1991, yang menimbulkan banyaknya pertikaian yang terjadi di berbagai wilayah Somalia. Kebijakan Siad Barre yang dikenal dengan scientific socialism yang bertujuan untuk menghapuskan clanism dalam memperkuat politik berdasarkan pada kelompok-kelompok.

Awal sejarahnya, Somalia memang sudah terpecah menjadi dua bagian yakni, bagian utara dikuasai oleh Inggris sedangkan di bagian selatan dikuasai oleh Italia. Pada tahun 1960, berdirilah Republik Somalia dimana bahwa keseimbangan wakil-wakil suku wilayah utara dan selatan yang berada di pucuk pemerintahan

maka dengan sendirinya akan membangun persatuan dari dua kelompok tersebut. Somalia merupakan salah satu dari negara yang masih less development dimana tidak pernah henti-hentinya mengalami konflik baik dalam internal maupun eksternal negaranya dengan negara-negara tetangganya yakni, Ethiopia. Secara geografis Somalia berada di kawasan Afrika Timur, yang seringkali mengalami konflik berkepanjangan karena hal itu dipicu oleh keadaan Somalia sendiri yang masih sangat terbelakang, dimana tingkat kemiskinan merupakan urutan tertinggi di dunia.

Sejak masa kemerdekaan tahun 1960 pemerintahan Somalia sampai ke pemerintah pusat, mengadopsi suatu perpaduan antara hukum Islam dan sistem ketatapemerintahan barat yang selaras dengan semangat moderat dan keyakinan rakyat Somalia. Somalia juga salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi pemerintah

yang tinggi, absensi legitimasi terhadap pemerintah, banyaknya pelanggaran HAM, perang sipil, serta hilangnya legitimasi hukum karena ambiguitas preferensi sistem hukum yang terdistorsi, menjadikannya sebagai proses pengidentifikasian Somalia dan restrukturisasi pasca perang sipil yang menyebabkan berakhirnya pemerintahan Siad Barre pada tahun 1991.

Konflik antar etnis muncul sejak Somalia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1960 sebagian besar penduduk Somalia memiliki latar belakang kebudayaan serta tradisi adat istiadat yang kuat, walaupun terbagi dari beberapa etnis dan klan. Islam merupakan agama mayoritas yang memiliki kedekatan dengan para penduduk disana. Selain itu, penduduk Somalia yang tinggal di Tanduk Afrika, harus mampu

menyesuaikan diri dengan kondisi alam Afrika yang sangat gersang dan tandus.

Somalia merupakan negara yang terdiri dari banyak kelompok etnis minoritas yang homogen, dimana perbedaan etnis di Somalia justru memiliki kesamaan bahasa dan agama, namun konflik yang terjadi Somalia berasal dari perpecahan antara klan-klan kelompok minoritas dengan mayoritas.³

Somalia adalah tanah strategis, yang menjadi kunci regional. Di samping itu wilayah Somalia memiliki sumber daya alam, seperti minyak, gas dan uranium sedangkan bagian pantai Somalia dijadikan sebagai jalur transportasi maritim internasional yang sangat penting. Munculnya konflik internal, disebabkan karena Somalia memiliki sejarah konflik dengan Ethiopia dimana dukungan

Somalia untuk perjuangan kemerdekaan rakyat Somalia di Ethiopia.

Penting sekali untuk memahami sebab-sebab mengapa konflik internal terjadi, apa pemicunya, sehingga diharapkan penyelesaian atau solusi bisa didapatkan, untuk mencegah konflik agar tidak meluas. Benua Afrika merupakan salah satu benua yang paling sering terjadi konflik internal yang akhirnya meluas ke negara lain. Apalagi saat ini sangat banyak konflik politik yang terjadi di dunia. Penelitian ini membahas tentang sebab-sebab konflik internal yang sering melanda Somalia yang melibatkan warga sipil.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini menggunakan konsep Perang Sipil, dimana perang Sipil erat kaitannya dengan konflik

³ "Singkat konflik Somalia" Sumber Perdamaian.. <http://www.cr.org/our-work/accord/somalia/endless-war.php>. diakses pada tanggal 20 Mei 2010 jam 12.00 WIB.

internal. Pada umumnya pertikaian dan kontak senjata antar-warga terjadi dalam wilayah yurisdiksi suatu negara dan menjadi konflik internal.

Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse menggunakan *contemporary conflict* untuk mengacu secara spesifik konflik-konflik yang terjadi setelah Perang Dingin berakhir.⁴ M. Kaldor dan Vashee B menggunakan istilah “perang baru” untuk membedakannya dari perang konvensional model Clausewitzian dimana ciri-cirinya dilihat dari tujuan politik, ideologi dan mobilisasi, pembiayaan perang, dukungan eksternal dan bentuk peperangan yang terjadi. Perang Sipil sering juga dikategorikan *intra-state conflict*.

Menurut Brown, kata ‘konflik etnis’ seringkali digunakan secara fleksibel. Bahkan, dalam beberapa penggunaannya, kata ini justru

digunakan untuk menggambarkan jenis konflik yang sama sekali tidak mempunyai basis etnis.⁵ (hal. 81) Contohnya adalah konflik di Somalia. Banyak pihak mengategorikan konflik yang terjadi di Somalia sebagai konflik etnis. Padahal, Somalia adalah negara paling homogen dalam hal etnisitas di Afrika. Konflik di Somalia terjadi bukan karena pertentangan antar etnis, melainkan karena pertentangan antara penguasa lokal satu dengan penguasa lokal lainnya, yang keduanya berasal dari etnis yang sama.

Konflik etnis juga, menurut Brown, biasanya berangkat dari konflik lokal yang sama sekali tidak memiliki basis etnisitas, tetapi kemudian melebar cangkupannya, bahkan sampai melintasi batas-batas negara. Biasanya, negara

⁴ Hugh Miall, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. (1999). *Contemporary Conflict Resolution*. London. Polity press. Hal 66

⁵ Michael Brown, *Op.Cit*, hal 81

tetangga dari komunitas yang berkonflik memilih satu dari dua bentuk intervensi berikut ini, yakni entah mereka memilih untuk menutup perbatasan guna mencegah penyebaran konflik lebih jauh, atau mereka memilih untuk intervensi ke komunitas yang tengah berkonflik untuk melindungi kepentingan ekonomi maupun politik mereka. Komunitas internasional juga bisa melakukan intervensi atas dasar kemanusiaan, terutama ketika konflik yang terjadi mulai menyebar dan melukai banyak warga sipil.

Untuk memahami akar konflik Brown mengajukan tiga level analisis untuk memahami akar-akar penyebab konflik. Level pertama adalah level sistemik. Level kedua adalah level domestik, dan level ketiga adalah level persepsi.⁶ Pada level sistemik, penyebab pertama terjadinya konflik adalah lemahnya otoritas negara, baik nasional maupun internasional, untuk mencegah kelompok-kelompok etnis

yang ada untuk saling berkonflik. Otoritas yang ada juga sangat lemah, sehingga tidak mampu menjamin keselamatan individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut. “.. di dalam sistem dimana tidak adanya penguasa”, demikian tulis Brown, “ yakni, dimana anarki berkuasa, semua kelompok haruslah menyediakan pertahanan dirinya sendiri-sendiri...”⁷ Setiap kelompok resah, apakah kelompok lain akan menyerang mereka, atau ancaman dari kelompok lain akan memudar dengan berjalannya waktu. Masalahnya adalah, sikap pertahanan diri suatu kelompok, yakni dengan memobilisasi tentara dan semua peralatan militer, bisa dianggap sebagai tindakan mengancam oleh kelompok lainnya. Pada akhirnya, hal ini akan memicu tindakan serupa dari kelompok

⁶ ibid, hal 88-90

⁷ ibid

lain, sekaligus meningkatkan ketegangan politis di antara dua kelompok tersebut.

Brown lebih jauh menambahkan, bahwa ada dua kondisi yang memungkinkan terjadi ketidakstabilan politis. Pertama, kondisi ketika pihak yang menyerang dan pihak yang bertahan tidak lagi bisa dibedakan. Suatu kelompok tidak lagi bisa menentukan, apakah mereka dalam posisi bertahan, atau posisi menyerang. Mereka akan mempersiapkan kekuatan militernya yang digunakan untuk bertahan. Akan tetapi, kelompok lainnya akan mengira, bahwa kelompok tersebut sedang mempersiapkan kekuatan militernya untuk menyerang. Ketegangan antara kedua kelompok pun tidak lagi terelakkan. Kedua, jika kekuatan penyerangan lebih besar dari kekuatan bertahan, maka suatu kelompok akan cenderung untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Menurut Brown, kedua kondisi ini biasanya muncul, ketika

rezim otoriter yang berkuasa tiba-tiba roboh, dan ini membuat setiap kelompok yang ada di dalam masyarakat tersebut terpaksa berusaha untuk mempertahankan eksistensinya masing-masing. Di dalam situasi ini, siapa pihak yang menyerang dan siapa pihak yang bertahan amatlah sulit untuk dibedakan. Biasanya, kelompok-kelompok yang saling bertempur pasca jatuhnya suatu rezim otoriter tidak menggunakan teknologi perang yang canggih. Mereka hanya bersandar pada kekuatan infanteri. Efektivitas infanteri tersebut bersandar pada kekuatan motivasi dan kuantitas pasukan. Mobilisasi infanteri dari suatu kelompok tertentu, menurut Brown, biasanya akan mendorong kelompok lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Level analisis kedua mengenai akar-akar penyebab

konflik etnis berada di level domestik. Menurut Brown, level domestik ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kehendak rakyatnya, pengaruh nasionalisme dan relasi antar kelompok etnis di dalam masyarakat, serta pengaruh dari proses demokratisasi dalam konteks relasi antar kelompok etnis. Setiap orang selalu mengharapkan agar pemerintahnya menyediakan keamanan dan stabilitas ekonomi.

Kedua hal ini akan bermuara pada terciptanya kemakmuran ekonomi yang merata di dalam masyarakat. Apa yang disebut nasionalisme, menurut Brown, sebenarnya adalah "konsep yang menggambarkan kebutuhan untuk mendirikan suatu negara yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan ini."Tuntutan ini akan semakin besar, ketika pemerintah yang berkuasa tidak mampu mewujudkan cita-cita tersebut. Di dalam masyarakat pasca pemerintahan rezim otoriter,

pemerintah yang berkuasa sedang mengalami proses adaptasi, dan seringkali belum mampu mewujudkan kestabilan ekonomi maupun politik. Akibatnya, tingkat inflasi dan pengangguran meningkat tajam. Prospek perkembangan ekonomi pun suram. Dalam banyak kasus, kelompok etnis minoritas menjadi kambing hitam dari semua permasalahan ini. Mereka menjadi tumbal dari kekacauan yang terjadi.

Problem ini semakin rumit, ketika logika yang bergerak bukanlah lagi logika nasionalisme, melainkan logika fundamentalisme etnis. Begini, ketika pemerintah yang berkuasa sangatlah lemah, paham nasionalisme biasanya lebih didasarkan pada perbedaan etnis, dan bukan pada suatu pemikiran bahwa setiap orang yang hidup di suatu

negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Di sisi lain, paham nasionalisme yang didasarkan pada fundamentalisme etnis akan membuat suatu kelompok dapat dengan mudah memobilisasi massa, dan membentuk suatu pasukan yang memiliki motivasi berperang yang tinggi. Jika sudah seperti ini, kekuatan militer akan menjadi suatu kekuatan yang sangat kejam. Perang dengan skala kekejaman yang masif pun tidak lagi bisa terelakkan.

Level ketiga adalah level persepsi. Beberapa ahli berpendapat, bahwa penyebab terjadinya konflik etnis adalah, karena adanya pemahaman sejarah yang tidak tepat mengenai relasi antara dua atau lebih kelompok etnis.⁸ Sejarah yang mereka yakini bukanlah hasil dari penelitian yang punya dasar metodis dan obyektivitas, melainkan dari rumor, gosip, dan legenda, yang biasanya diturunkan dari satu generasi ke

⁸ *ibid*, hal 92

generasi lainnya. Cerita-cerita tersebut kemudian menjadi bagian dari adat istiadat. Dengan berlalunya waktu, cerita-cerita ini semakin jauh dari realitas, dan semakin banyak bagian yang dilebih-lebihkan. Di dalam cerita-cerita tersebut, kelompok etnis lain seringkali memperoleh cap buruk, sementara kelompok etnis sendiri memperoleh nama baik yang seringkali berbeda dengan realitasnya. Kelompok etnis lain dipandang sebagai suatu kelompok yang secara inheren jahat dan agresif. Anggota kelompok etnis setempat memandang pemahaman ini sebagai suatu bentuk kebijaksanaan leluhur yang diturunkan ke generasi mereka.

Michael E Brown dalam bukunya yang berjudul *The International Dimension of Internal Conflict* menyebutkan

beberapa faktor.⁹ Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan kekerasan dimana-mana. Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik. Pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, pengusiran merupakan metode yang banyak dipakai untuk mengalahkan pihak musuh. Jutaan manusia terbunuh atau terpaksa menjadi pengungsi merupakan pemandangan yang biasa ditemukan dalam daerah-daerah konflik.

Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke wilayah negara tetangga atau pemberontak yang mencari perlindungan ke negara yang berbatasan langsung menimbulkan

masalah baru yang tidak mudah diselesaikan karena tidak hanya bernuansa politik tetapi juga ekonomi, etnis, budaya, dan keagamaan. Bahkan masalah perbatasan menimbulkan konflik bersenjata antara negara yang bertetangga.

Keempat, konflik internal juga penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional. Kelima, komunitas internasional terus berusaha menggalang kerjasama guna menyelesaikan konflik-konflik internal agar menjadi lebih efektif demi keamanan internasional.

Perang sipil merupakan perang yang terjadi antara kelompok yang terorganisasi dalam sebuah wilayah negara-bangsa, atau secara umum, antara dua negara yang awalnya

⁹ Michael E. Brown. (1996). "Introduction" dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*. Massachusetts: MIT Press. Hal. 1

merupakan sebuah negara-bangsa. Tujuan di satu sisi adalah negara atau kawasan, menerima kemerdekaan atas kawasan, atau mengubah kebijakan pemerintah. Merupakan sebuah konflik dengan intensitas tinggi, sering melibatkan satuan pasukan keamanan, yang berlangsung dan terorganisasi dalam skala yang besar. Perang sipil menimbulkan korban dalam skala yang besar dan konsumsi sumber daya yang signifikan.

Perang Sipil yang terjadi setelah Perang Dunia II meningkat, setidaknya ada lima Perang Sipil yang terjadi di awal hingga pertengahan abad-20, lebih dari 20 Perang Sipil terjadi di akhir Perang Dingin, sebelum penurunan signifikan konflik yang dihubungkan dengan kekuatan superpower berakhir. Sejak tahun 1945, Perang Sipil menimbulkan kematian lebih dari 25 juta penduduk, kerusakan infrastruktur, dan *economic collapse*. Setidaknya ada dua teori yang dapat menjelaskan penyebab

utama Perang Sipil, Ketamaman Vs keluhan. *Roughly stated/ failed state*, dimana konflik ditimbulkan oleh orang-orang dalam definisi etnisitas, agama, atau status sosial lainnya, atau konflik dimulai oleh kepentingan ekonomi dari kelompok atau individu yang memulainya.

Benua Afrika merupakan benua dengan kompleksitas masalah paling rumit di dunia. Kemiskinan, kesehatan, ekonomi, kelaparan bahkan peperangan antar suku mewarnai benua hitam itu selama berabad-abad. Intervensi eksternal dan konflik internal menjadikan benua itu diliputi *neverending war* sejak zaman dahulu. Salah satu negara yang masih diliputi konflik dan perang sipil hingga saat ini adalah Somalia. Somalia dilanda perang sipil sejak tahun 1991 hingga saat ini.

Encarta mencatat hampir 50.000 terbunuh dalam peperangan dan 300.000 meninggal karena kelaparan dalam waktu 23 bulan sejak Januari 1991. Washington post mencatat kematian mencapai 350.000 di bulan Februari 1993, CDI mencatat 350.000 kematian dalam periode 1978-1997, Ploughshares mencatat 350.000 kematian di tahun 2000, data war annual 8 di tahun 1997 mencatat kematian mencapai 500.000, sementara tanggal 14 Desember 1998 Vancouver Sun memaparkan jika 400.000 kematian disebabkan perang, kelaparan dan penyakit sejak tahun 1991, dan sebanyak 300.000 di periode 1991-1992. Tanggal 23 mei 1999 Denver Rocky Mtn News memaparkan jika kematian mencapai 350.000 di penghujung tahun 1992 dan mencapai 1 juta di tahun 1999. IRIN dan unit informasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat hampir 300.000 terbunuh selama perang 14 tahun.

Penderitaan di Somalia merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, hampir 1.5 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dan lebih dari 560.000 penduduk menjadi pengungsi di negara tetangga, terutama di Kenya (309.000), Yaman (163.000) dan Ethiopia (59.000).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁰

Dalam metode ini penulis berusaha mendeskripsikan konflik internal yang terjadi di Somalia, dimulai dari akar penyebab konflik sampai ke dampak dari konflik. Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

D. Pembahasan

Somalia sebagai negara yang tidak Bertuan

Somalia yang disebut juga sebagai dengan nama "Jaamhuuriyadda Dimuqraariga Soomaaliya", merupakan salah satu negara muslim yang secara geografis terletak di Afrika timur laut, yang

berbatasan dengan teluk Aden disebelah utaranya. Negeri ini juga dikitari oleh Samudera Hindia dari timur hingga selatannya, serta negara Kenya, Ethiopia dan Jibouti disebelah baratnya. Negara tersebut yang sekarang lebih terkenal karena di ekspos oleh berbagai media internasional karena kononnya seringkali segelintir warganya menjarah berbagai kapal yang berlayar di lepas pantai perairan Somalia serta menyandera awaknya.

Meskipun dikawal oleh armada multi nasional, namun mereka masih berhasil juga menggiring konvoi kapal tanker raksasa keperaiannya dan baru dibebaskan kapal dan awaknya pasca menerima tebusan dari pemilik kapal tersebut. Somalia yang beribukota Mogadishu berpenduduk sekitar 8 jutaan itu, yang menurut sensus tahun 1989 mayoritas penduduknya

¹⁰ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia (Jakarta:1988), hal.63

beragama islam (99,8 persen). Mereka menggunakan bahasa resminya Somali ,juga bahasa Arab,Inggris dan Italia.

Bangsa Somalia mendiami lahan yang luasnya 637.000 kilometer persegi itu,sebenarnya merupakan salah satu negeri yang pertama tama memeluk Islam. Sebelum islam datang kesana,negeri Somalia tidak dikenal di panggung sejarah dunia karena penduduknya terdiri dari suku suku yang hidupnya belum menetap.Namun setelah islam datang sejarah negeri tersebut baru tampak,bahkan selanjutnya menjadisalah satu negeri yang merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban dunia pada abad pertengahan.Terdapat suatu prndapat para sejarawan bahwa hijrah kaum muslimin yang pertama dan kedua ke Habsyah (kini:Ethiopia) pada masa Nabi Muhammad SAW melalui negeri ini,serta sempat bermukim di Somalia beberapa waktu lamanya sembari mensosialisasikan Islam kepada

penduduk setempat serta berketurunan disana. Oleh karenanya sampai sekarang di Somalia masih terdapat suku suku yang mempunyai silsilah keturunan dari Uqail bin Abi Thalib.

Setelah itu banyak warga Somalia memeluk Islam dengan jalan hijrah atau melalui perdagangan.Pada masa Dulah Bani Umayyah berkuasa di Damascus,khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (685-705 M) dalam rangkaian ekspansinya pernah mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan panglima Jenderal Mus bin Jasy'am. Dalam hal itu, meskipun bani Umayyah mengirim pasukannya kesana namun tidak terjadi pertempuran dengan warga setempat. Tetapi sebaliknya,bahkan terjadi proses Islamisasi secara intensif dan

ekstensif sehingga agama Islam semakin membumi di Somalia.

Selanjutnya rakyat Somalia sudah sangat akrab dengan Islam. Perkembangan Islam semakin pesat di Somalia karena banyak tokoh muslim pendukung Mazhab Zaidiyah menyelamatkan diri kesana, terutama setelah Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib dan pendiri Mazhab Zaidiyah terbunuh dalam suatu pertempuran dengan pasukan khalifah Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan (724-743 M) dari Dinasti Bani Umayyah. Mereka mendiami daerah daerah pesisir Banadir dengan bercocok tanam dan berdagang untuk menyambung hidupnya dinegeri Somalia, kemudian mereka lalu membentuk sebuah komunitas masyarakat Syiah. Dalam kurun waktu selanjutnya, mereka terdesak oleh orang orang Arab yang muslim sunni yang datang dari negeri Ihsa di selat Arab.

Konflik antara Sunni dan Syiah yang sudah lama terjadi di

semenanjung Arabia juga terjadi di Somalia, sehingga pengikut Syiah dinegeri tersebut lambat laun menjadi tenggelam seiring dengan proses pembauran antara mereka dengan penduduk kota yang menganut Mzhab Sunni yang sudah datang sebelumnya. Pada abad ke sepuluh datang pula sekelompok orang Persia dari kota Syiraz ke Somalia lalu membangun kota Mogadishu, yang hingga kini menjadi ibukota Somalia. Sejarah kota tersebut sebelumnya bernama Humur, suatu nama suku Himyar (Arab Selatan) yang sebelumnya pernah mendiami daerah tersebut, lalu mereka membentuk sebuah keamiran disamping keamiran keamiran orang orang Arab. Kedua bangsa tersebut hidup berdampingan di Somalia, meskipun didaerah asalnya kedua bangsa itu

seringkali bertikai soal khilafiyah(Sunni-Syiah). Namun kedua bangsa itu di Somalia bisa hidup rukun,damai dan tenteram dan saling pengertian dan hormat menghormati satu dengan lainnya. Mereka secara bersama sama membangun Somalia dengan berdagang,bercocok tanam sembari mengajar anak anak pribumi . Karena jasa merekalah sekitar abad ke sebelas Islam sudah tersebar diseluruh pelosok negeri Somalia . Pada masa ini belum terdapat satu pemerintahanpun yang menyatukan seluruh keamiran pesisir dengan suku suku pedalaman Somalia. Masing masing keamiran masih berdiri sendiri, hidup damai berdampingan, serta saling memperkuat tali persahabatan. Kondisi seperti itu berlangsung sekitar dua abad lama.

Pada abad ketiga belas, Syekh Umar Fakhruddin , seorang pribumi kharismatik berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah seputar kota Mogadishu ,serta membangun sebuah kesultanan.

Setelah beberapa waktu lamanya ia berkuasa ,dilanjutkan estafet kekuasaan pribumi oleh Abubakar,putranya.Tradisi seperti itu terus berlangsung ,yang mencoba sekuat tenaga untuk menyatukan seluruh keamiran supaya berada dibawah satu kerajaan. Meskipun sudah diupayakan secara maksimal,namun tetap gagal karena rongrongan Portugis yang mulai merealisasikan konsep"reconquesta"(yang disponsori Paus Urbanus II di Perjanjian Tordisellas tahun 1494) di Somalia.

Pada tahu 1499 bangsa Portugis berhasil menganeksir sebagian wilayah Somalia,dan pada tahun 1503 seluruh kawasan pesisir kecuali kota Mogadishu telah dikuasai oleh armada militer Portugis yang mendukung eksploitasi misi ekonominya. Dibawah

pemerintahan imperialisme Portugis yang senantiasa menerapkan konsep reconquestanya atau Gold,Glory,dan Gospelnya dimanpun negara Eropa selatan itu berada ,maka negeri Somalia mengalami kehancuran kebudayaan dan peradabannya yang mulai tumbuh.Perekonomian Somalia hancur,serta berbagai aspek sosial masyarakat lainnya juga mengalami nasib serupa.Hal seperti itu berlangsung sekitar seratus tujuh puluh tahun lamanya .Akhirnya Portugis berhasil diusir oleh pasukan muslim bantuan dari Oman dibawah pinpinan Jenderal Salim As Sarimi.

Rakyat Somalia mekipun berhasil mengusir Portugis bersama bantuan pasukan Oman,namun rupanya keadaan yang sempat mereka rasakan sebelumnya semakin sulit diperoleh kembali dan harus dibayar dengan harga sangat mahal.Karena antara abad ke 13 hingga abad ke 16 terjadi konflik antara Somalia yang muslim dengan tetangganya Ethiopia yang nasrani,yang merupakan warisan

konflik yang ditinggalkan penjajah dari semenanjung Iberia sebelumnya, Portugis.

Pada tahun 1506-1542 pasukan muslim dibawah pimpinan Jenderal Ahmad bin Ibrahim Al Ghazi,seorang pribumi Somlia asli berhasil mengakhiri konflik tersebut dan menguasai Ethiopia. Lambat laun mereka berhasil menguasai kawasan pesisir yang sebelumnya dihuni oleh orang orang dari etnis Bantu, salah satu kelompok etnis di Ethiopia. Pada abad ke 17 mereka berhasil menguasai seluruh kawasan tersebut,dan sejak itu sejarah daerah pesisir utara menjadi daerah sejarah kekuasaan Somalia. Proses Islamisasi tidak hanya melalui migrasi dan perdagangan saja,tetapi juga sangat besar peranannya proses Islamisasi melalui pendidikan.

Dalam konteks ini pendidikan dimulai dari lembaga lembaga pendidikan yang disebut "kuttab kuttab" yang tersebar diberbagai pelosok Somalia. Dengan kurikulumnya diatur dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga yang paling utama adalah mata pelajaran di kuttab kuttab itu adalah Al Qur'an, bahasa Arab, dan beberapa ilmu pengetahuan dasar yang menunjang proses pembelajaran itu. Setelah dianggap selesai belajar di kuttab kuttab, mereka melanjutkan studinya ke kota-kota yang proses pembelajaran tentang ke-Islaman diadakan di masjid masjid, dan kemudian melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi lagi, bahkan ada diantaranya yang sampai ke Universitas Al Azhar, Mesir, salah satu universitas tertua didunia. Karenanya di Somalia pada abad ke 20 tidak terdapat pusat ilmu selain yang berkaitan erat dengan Islam.

Pada abad ke 19 Somalia telah menjadi kancah konflik persaingan

bangsa Eropa antara Inggris, Jerman, Perancis dan Italia. Mereka hendak menguasai wilayah di tanduk benua hitam yang secara geografis itu sangat strategis dimulut pintu masuk dan keluar ke dan dari Laut Merah dan Samudera Hindia-Laut Arab, untuk mengawal armada dagang mereka dari gangguan lawannya. Sebagai konsekuensinya, Somalia dipecah menjadi dua bagian oleh Inggris di utara dengan pusatnya di Hargeisa dan Italia di selatan dengan pusat kolonialnya di Mogadishu.

Akhirnya, Inggris pada tanggal 26 Juni 1960 dan Italia tanggal mengakui kemerdekaan Somalia. Pada tanggal 1 Juli tahun 1960 Italia mengikuti jejak Inggris, dengan mengakui kemerdekaan Somalia baik secara de facto maupun secara de jure. Maka muncullah sebuah

negara Somalia bersatu yang bentuknya republik demokrasi dengan Presidennya yang pertama Adam Abdullah Usman, serta sejak bulan September pada yang sama Republik Somalia secara resmi menjadi anggota PBB. Sebagai negara yang baru merdeka dan baru lepas dari eksploitasi kolonial tersebut tentu saja mengalami berbagai krisis warisan kolonial sebagaimana halnya Indonesia di awal kemerdekaannya.

Krisis politik, ekonomi, dan sosial budaya menyebabkan terjadi kekacauan di Somalia yang menggiring kearah perebutan kekuasaan pada tahun 1969. Suatu dewan revolusioner dibawah pimpinan Muhammad Syad merebut kekuasaan dari tangan Presiden Shermerke, serta segera merubah bentuk negara Somalia yang sebelumnya Republik Demokrasi menjadi negara sosialis. Namun Muhammad Syad Barre tidak lama bisa menikmati kekuasaannya, sebab dua tahun berikutnya ia tersingkir dari kekuasaannya. Sejak saat

itu negara Somalia tercabik-cabik karena terjadi perebutan kekuasaan antar sesama suku-suku yang hendak menguasai Somalia. Konflik intern semakin berkepanjangan yang menambah penderitaan rakyat Somalia, yang semakin mencapai puncaknya pada tahun 1992 dimana terjadi kelaparan di Somalia.¹¹

Tragedi tersebut mengundang pasukan PBB untuk mengawal proses pengiriman bantuan sandang pangan PBB supaya benar-benar sampai dan diterima oleh rakyat Somalia. Tetapi kedatangan pasukan baret biru kesana juga tidak banyak menyelesaikan masalah kemanusiaan di Somalia, bahkan terutama pasukan Amerika Serikat justru terseret kedalam konflik intern

¹¹ Dewi Fortuna Anwar, dkk, *Konflik Kekerasan Internal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 137

Somalia yang sangat ditentang oleh salah satu faksi pimpinan Farah Aidit. Pada akhirnya pasukan AS ditarik dari Somalia setelah terjadi insiden Mogadishu yang banyak menelan korban dari pasukan Paman Sam tersebut, sehingga Presiden AS waktu itu, Bill Clinton terpaksa menanggung malu karenanya.

Kondisional Somalia sampai sekarangpun layaknya sebuah negara yang menjadi ajang perang saudara antara faksi faksi yang bertikai itu, sehingga berbagai wilayah di Somalia termasuk ibukotanya Mogadishu itu seperti kota hantu, yang sepi selain para milisi bersenjata yang saling bertempur satu sama lainnya padahal para pihak yang bertikai tersebut muslim.

Pemerintah Somalia lumpuh, seperti negara yang tidak bertuan. Keadaan disana masih diselimuti misteri, jika ada informasi dari sana sulit dipercaya kebenarannya. Kini seperti masyarakat internasional sudah mengabaikan masalah

Somalia, karena belum ada suatu solusi untuk menyelesaikan konflik dan tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung tiada henti.

Kontrol Negara dan *Failed State*

Negara dunia ketiga di kawasan Afrika ini sangat rentan sekali terjadinya konflik, hal itu disebabkan negara-negara tidak hanya terlibat dalam konflik antar negara melainkan dengan konflik internal dalam negaranya. Negara Somalia merupakan suatu wilayah yang dianggap kurang menguntungkan bagi kepentingan negara maju dan berkembang, karena di kawasan ini seringkali terjadi konflik yang menimbulkan adanya krisis kemanusiaan bagi sebagian besar penduduk di Somalia.

Semenjak pemerintahan Mohammed Siyad Barre tahun 1991, wilayah Somalia tidak pernah memiliki pemerintahan yang bersifat fungsional, dikarenakan wilayah Somalia diatur oleh para militan militer bersenjata dari berbagai suku. Pada tahun 1990 wilayah Somalia mengalami krisis kekurangan bahan pangan yang menyebabkan sebagian besar penduduk meninggal dunia akibat kemunduran perekonomian negaranya. Banyaknya penderitaan yang harus ditanggung oleh rakyat Somalia, maka pihak PBB berperan melakukan tindakan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik di Somalia. Tindakan tersebut sangat didukung oleh pihak pemerintahan Somalia sendirinya dan negara-negara anggota PBB untuk mempertahankan stabilitas nasional demi mewujudkan perdamaian dunia.

Sejak pertikaian di Somalia mulai menyebar ke seluruh wilayah di Somalia yang melibatkan unsur

militer, bila dilihat secara keseluruhan negara Somalia tidak lagi memiliki pemerintahan pusat dan seluruh institusi infrastruktur pemerintahan pun juga tidak berjalan dengan baik.

Pada bulan Agustus 2004, Parlemen Federal Transisional Somalia dibentuk. Masing-masing menduduki 61 kursi di parlemen yang dibentuk oleh 4 suku mayoritas, sementara suku minoritas mendapatkan 31 kursi. Akan tetapi, tensi meningkat dalam lingkungan internal pemerintahan yang saling bersaing dalam kedudukan administrative di tahun 2005, masing-masing pihak terlibat dalam sengketa. Kedua kelompok adalah:

1. Jowar- yang dipimpin oleh Presiden Abdullahi Yusuf dan didukung oleh kelompok lainnya

2. Mogadishu- yang dipimpin oleh pembicara parlementer Sharif Hassan Sheikh A dan didukung oleh aliansi Mogadishu termasuk Mohammed Qanyare Affra, Osman Ali Atto, Muse Sudi Yalahow dan secara terpisah Baidoa warlord Mohammed Habsade

Pada bulan Januari 2006, kedua kelompok sepakat untuk bergabung membentuk pemerintahan dengan mengumpulkan 275 anggota suku dalam parlemen. Februari 2006, TFP bergerak dari Baidoa dan melaksanakan sesi pertamanya. Sepanjang tahun 2007 dan 2008, TFP berada di Baidoa ketika Pemerintah Federal Transisional (TFG), cabang eksekutid dari negara termasuk kepresidenan, dilokasikan di Mogadishu. Dua kelompok lain (termasuk TFP) mendirikan negara baru: deklarasi reepublik Tanah Somalia di baratdaya; dan wilayah

semi-otonom dari Puntland di timurlaut¹²

Mereka beraliansi dengan sekelompok menteri dari TFG dan kelompok pemimin yang terdiri dari *Alliance for Restoration of Peace and Counter-Terrorism* (ARPCT) untuk memerangi terorisme dan menjaga stabilitas negara di bulan februari¹³ Kelompok ini dikatakan satu kubu dengan Amerika Serikat dan pemerintahan Ethiopia yang mengerahkan pasukan di Mogadishu di akhir tahun 2006 untuk menggantikan kekuatan *Supreme Council of Islamic Courts* (SCIC) dan mendukung Transitional Federal Government. Kelompok yang menjadi lawan adalah berbagai macam kelompok oposisi Islam terutama *Supreme Council of*

¹² US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, Somalia, 2006-2008

¹³ *ibid*, March 07, 2007

Islamic Courts (SCIC) yang dibentuk dari *Islamic Courts Union* (ICU), *Joint Islamic Courts*, *Union of Islamic Courts* (UIC), atau *the Supreme Islamic Courts Council* (SICC), sebuah kelompok dengan hukum Islam fundamental yang menekankan masalah administrative dan pengawasan pemerintah harus berdasarkan sistem Shari' a, mereka berniat untuk mengembalikan situasi kawasan yang chaos akibat perang sejak tahun 1991, dalam kelompok ini juga ada golongan radikal bernama -al Shabab, yang dalam bahasa Somali berarti "anak laki-laki" yang dikatakan terhubung dengan Al-Qaeda.

Kelompok Anti-pemerintah dan organisasi ekstrimis seperti Al-Shabab, yang dikatakan beberapa anggotanya tergabung dengan al-Qaeda, bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan kemanusiaan, termasuk pembunuhan anggota TFG dan masyarakat sipil, penculikan dan penghilangan, pembatasan kebebasan bergerak, pembunuhan aktivis

kemanusiaan.¹⁴ Militer Eritre, yang juga diketahui memainkan peranan dalam konflik yang terjadi di Somalia.

Eskalasi Konflik Tahun 1998-2008

Pada tahun 1998, pertikaian antar kelompok etnis terjadi di beberapa wilayah negara. Di tahun 1999, pertikaian antar kelompok etnis berlanjut, dimana serangan dan serangan balik berpusat di wilayah pusat dan selatan negara. Lebih dari 100 penduduk dibunuh dalam berbagai macam benturan. Pada tahun 2000, pertikaian antar etnis berlanjut ke wilayah pusat dan selatan Somalia, terutama di Mogadishu sehingga dibentuk pemerintahan darurat di negara Djibouti. Sedikitnya 200 penduduk, termasuk pekerja kemanusiaan, terbunuh di akhir

¹⁴ ibid, 11 March, 2008

September, meningkat dari kematian di tahun 1999.

Pada tahun 2001, konflik antar suku berlanjut di Somalia, dimana hampir seluruh pertikaian yang terjadi terletak di Mogadishu. Sebanyak 400 penduduk terbunuh di tahun ini, kebanyakan adalah penduduk sipil yang terlibat dalam kontak senjata. Di bulan Januari, PBB setuju untuk mengirimkan pasukan perdamaian dan mengakui adanya pemerintahan di Somalia.

Pada tahun 2002, pertikaian antara kelompok berseberangan dan pemerintahan transisional terjadi hampir di seluruh wilayah Somalia. Konferensi Rekonsiliasi Nasional Somalia yang berlangsung di Kenya diadakan di Bulan Oktober dengan perwakilan dari sejumlah suku yang berseberangan, Pemerintahan Transisi Nasional (TNG) dan berbagai komunitas mengikuti diskusi perdamaian ini untuk membicarakan isu perdamaian dan stabilitas pemerintahan.

Pada tahun 2003, terjadi konflik antar suku dan benturan antar kelompok militer, yang mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar di wilayah Mogadishu. Walaupun banyak pertikaian yang terjadi, Konferensi Rekonsiliasi Nasional Somalia di Kenya menghasilkan sebuah piagam transisional yang menitikberatkan pembentukan struktur Somalia di masa yang akan datang. Di bulan Mei, Uni Afrika membuat inisiatif militer dalam rangka misi pengamatan ke Somalia.

Pada tahun 2004, Konferensi Rekonsiliasi Nasional Somalia membuat langkah yang signifikan untuk mempersiapkan perdamaian yang komprehensif dengan membentuk sebuah parlemen transisional dan pemilihan Presiden. Akan tetapi, di luar perkembangan ini, pertikaian masih terus berlanjut. Pemerintahan yang baru

menerima pengakuan internasional dan mendapatkan bantuan finansial serta pasukan perdamaian untuk merekonstruksi dan menjaga keamanan Somalia.

Padatahun 2005, federasi pemerintahan transisional dihadapkan pada dua golongan lawan yang mengancam dan akan menimbulkan perang satu sama lain dalam meningkatkan spektrum kekerasan dalam skala besar. Konflik antar-etnis dan pertikaian berlanjut pada pembajakan yang terjadi di antai Somalia yang mengancam pelayaran internasional.

Pada tahun 2006, reunifikasi dari Pemerintahan *Transitional Federal* (TGF), terlibat peperangan dengan *Supreme council of Islamic Court* (SCIC) di ibukota negara Mogadishu yang menimbulkan korban lebih dari 300 orang dan sebagian besar merupakan penduduk sipil. TGF kalah dan diisolasi di wilayah Baidoa. Ethiopia dan Eritrea juga terlibat dalam permusuhan antara TGF dan SCIC,

dimana Ethiopia mengirimkan pasukan untuk melindungi TGF dan Eritrea mengirimkan persediaan militer untuk SCIC. Amerika Serikat memainkan peran dalam *Alliance for Restoration of Peace and Counter Terrorism* (ARPCT). Eskalasi politik menimbulkan ketakutan akan Islam fundamental yang akan menyebabkan peningkatan kekerasan di gurun dan destabilisasi di tanduk kawasan.

Pada tahun 2007, eskalasi kekerasan sepanjang tahun sebagai akibat dari *Supreme Council of Islamic Courts* (SCIC) melanjutkan pemberontakan melawan Transitional Federal Governmeent (TGF) dan asukan Ethiopia. Hal ini membawa dampak yang sangat tinggi bagi penduduk sipil, lebih dari 1 juta rumah penduduk di ibukota Mogadishu hancur. PBB

mendeklarasikan Somalia sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terbesar di Afrika, akan tetapi tidak dapat mengirimkan pasukan perdamaian karena tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Uni Afrika mengirimkan pasukan perdamaian di awal tahun, akan tetapi, hanya 2000 pasukan yang dapat dikerahkan.

Ethiopia dan Eritrea turut bergabung dalam konflik, pasukan Ethiopia membantu TGF, sementara Eritrea menyediakan suaka politik bagi pemimpin SCIC. Sebuah sraft rekonsiliasi gagal di laksanakan di Bulan Juli dengan sebuah konvensi nasional, SCIC menolak untuk mendiskusikan perjanjian damai ketika pasukan asing menduduki tanah Somalia. Perselisihan kawasan antara wilayah Somalia dan sejumlah Puntland terjadi hingga akhir tahun.

Pada tahun 2008, kekerasan berlanjut hampir setiap hari antara *Islamic Courts Union* (ICU) dan penyandang dananya, Eritrea, dan pemberontakannya melawan Federasi

Pemerintahan Transisional (TGF) dan asosiasinya, termasuk pasukan Uni Afrika yang ditempatkan di Somalia dan pasukan Ethiopia yang didukung oleh Amerika Serikat. Ibukota negaraa, Mogadishu, hampir seluruhnya tertutup pasir di akhir tahun 2008, dengan lebih 2 juta penduduk kehilangan tempat tinggal dan 3.5 juta membutuhkan bantuan makanan. PBB diminta untuk melakukan perwakilan internasional, tidak memberi sebuah mandat untuk peacekeeping dan misi stabilisasi ke Somalia di tahun 2008. Sebuah perjanjian perdamaian antara TGF dan Aliansu untuk Liberalisasi Somalia (ALS) ditandatangani di bulan Juni, akan tetapi tidak berhasil.

Militan bersayap ICU, Al-Shabab, menolak untuk menyepakati beberapa

perjanjian hingga pasukan Ethiopia keluar dari negara dan berjanji meningkatkan dan melanjutkan kekerasan. Di sepanjang tahun 2008. Amerika Serikat membom lokasi yang disinyalir merupakan tempat Al-Qaeda bersembunyi, menyebabkan protes oleh masyarakat sipil di Somalia. Pasukan Ethiopia mulai menduduki Somalia di bulan Desember dan ICU mengambil kendali dua pelabuhan di negara, area pedesaan dan sebagian besar Mogadishu. Menurut data PBB, hampir 15.000 anggota kepolisian dan militer di tempatkan di gurun di bulan Desember. Lebih lanjut, di tahun 2008, perompakan meningkat di sekitar pantai selatan dan di Gurun Aden, hampir 27 kapal diserang dan digunakan untuk meminta tebusan. 33 agen yang bekerja di lembaga kemanusiaan dibunuh di tahun 2008, termasuk kepala UNDP untuk Somalia, 13 lainnya disandera oleh pemberontak, kebanyakan agen pertolongan internasional akhirnya meninggalkan Somalia. Di akhir tahun

2008, krisis kemanusiaan di Somalia menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan 3.5 juta penduduk membutuhkan pertolongan dan hampir 40.000 anak-anak mendekati kematian akibat kelaparan. Kematian sipil diakibatkan oleh konflik di tahun 2008 diperkirakan mencapai 3500 jiwa. Sejumlah lainnya tidak diketahui yang meninggal dari kalangan militer dan sipil berdasarkan epidemic dan kelaparan yang meningkat secara substansial.

Dampak Konflik Internal

Media independen melaporkan sebanyak 410.000 penduduk Somalia meninggal dalam konflik bersenjata. Di tahun 2008, 3500 penduduk sipil terbunuh dalam konflik di Somalia, dan jutaan lainnya kehilangn tempat tinggal. Perhitungan ini tidak termasuk

jumlah kematian militer dan sipil yang menderita penyakit epidemic dan kelaparan.

Di tahun 2007, lebih dari 6500 penduduk sipil meninggal dalam konflik di Mogadishu dan lebih dari 8500 penduduk terluka. Jumlah ini tidak termasuk kematian militer yang meningkat secara signifikan. Setidaknya 1000 orang meninggal, 4000 terluka di akhir perkelahian, dan 40% diantaranya adalah anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah.

Di tahun 2006, 300 penduduk sipil dibunuh dan hampir 1700 terluka dalam pertikaian yang terjadi di ibukota negara Mogadishu dan akhirnya menyebar di seluruh negara. Termasuk pembunuhan atas presiden TFG Abdullahi Yusuf dan pembunuhan atas Menteri Federal dan Konstitusi Abdallah Issaq Deerow.

Di tahun 2005 sedikitnya 200 orang terbunuh dalam bentrokan antar etnis terkait dengan sumber daya alam dan ekonomi. Jumlah

kematian yang sesungguhnya lebih besar. Di tahun 2004, lebih dari 520 manusia terbunuh dalam konflik, di tahun 2003, setidaknya 150 orang meninggal dan banyak anggota sipil yang terlibat dalam kontak senjata, tahun 2002, setidaknya 500 penduduk dibunuh dan kebanyakan di antaranya adalah penduduk sipil. Di tahun 2001 hampir 400 orang meninggal sebagai hasil dari pertikaian, dimana mayoritas diantaranya adalah penduduk sipil. Di tahun 2000, sedikitnya 200 orang meninggal, termasuk pekerja kemanusiaan. Di tahun 1999 lebih dari 100 penduduk terbunuh dalam beberapa bentrokan sepanjang tahun. Di tahun 1998, jumlah kematian mencapai 230 orang, terdiri dari penduduk sipil yang terlibat dalam konflik antar suku.

Selain pemberontakan berdarah, pemerintah Somalia

juga menghadapi rangkaian perompakan di lepas pantai negara itu. Pemerintah transisi lemah Somalia tidak mampu menghentikan aksi perompak yang membajak kapal-kapal dan menuntut uang tebusan bagi pembebasan kapal-kapal itu dan awak mereka. Perompak, yang bersenjata granat roket dan senapan otomatis, menggunakan kapal-kapal cepat untuk memburu sasaran mereka. Perairan di lepas pantai Somalia merupakan tempat paling rawan pembajakan di dunia, dan Biro Maritim Internasional melaporkan 24 serangan di kawasan itu antara April dan Juni 2008.

Krisis yang terjadi di Somalia diakibatkan adanya perebutan kekuasaan oleh pihak-pihak yang saling berseberangan. Akibat dari konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan rakyat yang tidak berdosa harus mengalami penderitaan, kelaparan, penyebaran wabah penyakit, serta munculnya arus pengungsiaan.

E. Kesimpulan

Jika dilihat dari faktor penyebab Perang sipil yang terjadi di Somalia, setidaknya, ada beberapa hal yang menyebabkan perang sipil dalam suatu negara terjadi, terutama untuk negara-negara berkembang khususnya Afrika, yang pertama adalah proses pembentukan negara dan bangsa (*state formation and national building*), bangkitnya etnisitas dan nasionalisme, faktor sosial ekonomi dan keterkaitan antara perlombaan senjata dan konflik.

Negara Somalia merupakan sebuah *failed state* yang bahkan tidak mampu melakukan fungsi keamanan dan pertahanan bagi negaranya. Kudeta dan pemberontakan militer tidak mampu diredam, justru menimbulkan konflik internasional yang merambah di

ranah sipil. Kebanyakan korban yang jatuh adalah kalangan sipil yang bahkan tidak tahu apa tujuan dari perang yang sebenarnya "*if we win then for what, if we lose then by whom?*" di saat dunia internasional memulai perbaikan atas perang dan ancaman perang nuklir, negara-negara failed masih harus menghadapi ancaman dan bahkan mengancam warga negaranya sendiri, awal mula konflik adalah krisis terhadap otoritas seluruh pengorganisasian kekuasaan, masing-masing pihak baik negara dan masyarakat berada dalam sebuah lingkaran "ketakutan" dan 'kepentingan".

Pertikaian antar etnis juga muncul sebagai sebuah gerakan dan perlawanan akan marginalisasi dan stigmatisasi yang ditimbulkan oleh suku mayoritas. Mereka, suku minoritas, dalam taraf tertentu akan bangkit melawan dan menjadi musuh satu sama lain. Hal ini muncul dari diskriminasi budaya, sejarah dan penghinaan, serta propaganda.

Kompleksitas antar etnis muncul sebagai hasil dari "kepentingan" dan "penghargaan"

Kemiskinan dan penderitaan berkepanjangan menjadi sebuah bentuk klasik akan adanya perang. Ketika perut lapar, orang tidak akan segan-segan membunuh orang lain untuk mendapatkan makanan dan memperoleh kepuasan. Manusia tidak akan bisa berpikir rasional dan logis jika perut kosong. Sistem ekonomi yang diskriminatif dan masalah ekonomi yang kian parah menambah kompleksitas dan eskalasi ketegangan dalam setiap aspek kehidupan dalam bentuk "kepentingan" dan "ketakutan".

Pasca Perang Dingin, eskalasi politik internasional berada kembali di level *state* dan *sub-state*, senjata dan perlengkapan perang yang diproduksi selama Perang Dingin

tidak dapat digunakan. Propaganda dan “penciptaan perang” atas payung “intervensi kemanusiaan” yang kadang-kadang menjadi ajang penyaluran senjata dan militer kembali dipraktekkan di negara-negara yang “notabene” adalah negara tidak demokratis. Ketika asing memasuki sebuah negara karena adanya isu kemanusiaan dan konflik bersenjata internal, yang akhirnya diketahui senjata itu juga berasal dari mereka, menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan, sekali lagi atas nama demokrasi, akhirnya, akan menjadikan wilayah itu sebagai sebuah ajang permainan senjata dan militer untuk menyalurkan senjata-senjata yang tidak dipakai di masa Perang Dingin.

Akan tetapi, berbagai kompleksitas yang terjadi di dalamnya tidak membuat kita harus melupakan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk meredam atau bahkan mencari jalan keluar atas perang sipil. Ada beberapa hal yang harus diupayakan, antara lain :

Pertama, civil society hendaknya mengakui dan memajukan hak-hak kaum minoritas. *Kedua*, cara terbaik untuk melindungi hak-hak kelompok adalah dengan menggunakan lembaga-lembaga elit dalam pembagian kekuasaan. *Ketiga*, konflik dan perang yang menyangkut penentuan nasib sendiri harus diselesaikan di meja perundingan, keempat, aktor internasional harus berusaha dengan itikad baik, tanpa sejumlah kepentingan untuk melindungi hak-hak kaum minoritas,, termasuk jika mereka tidak diperkenankan melakukan campur tangan, jika hal tersebut tidak dapat menyelesaikan konflik *diplomacy coercive* dapat digunakan atas nama perdamaian. Terkesan utopis, akan tetapi hal itu lebih baik daripada sekedar analisis pragmatis yang akhirnya hanya

menimbulkan ketegangan yang lebih besar dikalangan sipil.

Akhirnya, perang baik dalam taraf internasional dan internal umumnya selalu dikaitkan atas kontinuitas dengan mitos "*fear, honor, interest*" yang menjadikan perang itu akan tetap ada, akan tetapi memiliki pola bahkan wajah yang berbeda. Setelah 17 tahun Perang Sipil, kekerasan di Somalia tidak hanya merupakan sebuah kebencian antar etnis, ideologi, agama, ekonomi akan tetapi oleh sesuatu yang lebih sederhana: *survival*.

DAFTAR PUSTAKA

Brown, Michael E. (1996). "Introduction" dalam Michael E Brown (ed). The international Dimentions of Internal Conflict. Massachusetts: MIT Press

_____. (1996). "The Causes and Regional Dimentions of Internal Conflict" dalam Michael E Brown (ed). The international Dimentions of Internal Conflict. Massachusetts: MIT Press

Buzan, Barry. (1991). People, States and Fear. New York: Harvester Wheatsheaf

Fortuna, Dewi, Anwar, Helena Bouvier, Glenn Smith dan Roger Tol (ed).(2005), *Konflik Kekerasan Internal*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Harff, Barbara and Ted Robert Gurr. (2004). Ethnic Conflict in World Politics. Oxford: Westview Press.

Kaldor, M. and Vashee B (eds.) (1997). New Wars: Restructuring the Global Military Sector. London: Pinter.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse (1999). Contemporary Conflict Resolution. London: Polity Press

Viotti dan Kauppi. (1997). International Relations and World Politics: Security Economy Identity. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Van Notten Michael. (2002) From Nation-State to Stateless Nation: The Somali Experience. http://www.liberalia.com/htm/mvn_stateless_somalis.htm[1 Juni 2010. 08.38 PM]

<http://www.cfr.org/publication/14247/>

Anna Yulia Hartati Konflik Internal Somalia Dalam Konteks Perang Sipil

http://www.dodccrp.org/files/Allard_Somalia.pdf

"Singkat konflik Somalia" Sumber Perdamaian.. <http://www.cr.org/our-work/accord/somalia/endless-war.php>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2010 jam 12.00 WIB.